

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pentingnya teknologi informasi bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran fungsi sistem informasi. Pentingnya penggunaan teknologi informasi tidak hanya didominasi oleh institusi swasta, tetapi juga sudah merambah ke instansi pemerintah. Adanya *e-goverment*, *e-procurement*, *e-transaction* dan aktivitas melalui teknologi informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya maupun antara pemerintah di negeri ini dengan pemerintah di negara lainnya merupakan implementasi penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah. Selain itu, dengan adanya penggunaan teknologi informasi, maka penyelenggaraan negara menuju *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif) serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat semakin mengalami peningkatan menuju upaya yang optimal. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi (Hamzah, 2009).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2009). Perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi

berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, *et al.*, 2007). Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas.

Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor publik berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2009).

Reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial (Christiaens, *et al.*, 2001). Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi sektor publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua manfaat, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat

memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003).

Mahmudi (Ardianto, dkk., 2013) mengatakan organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta berbagai kekurangan lainnya. Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik memunculkan kritik keras sehingga mendorong terjadinya reformasi manajemen sektor publik. Reformasi sektor publik tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi beberapa negara berkembang dan negara tertinggal secara aktif terus melakukan reformasi lembaga publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling populer adalah konsep NPM.

Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia dilakukan oleh Kusuma (2013) yang menunjukkan faktor-faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman sebelumnya dalam menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Sementara penelitian di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (Christiaens, 2001; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003 dalam Kusuma, 2013).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sangat penting, karena penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak

yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut

Berkaitan dengan pentingnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2013 masih menggunakan basis *cash towar accrual* dalam pelaporan keuangannya, padahal ketentuan untuk menerapkan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010 yaitu pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual (SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi) dengan penerapan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan instansi pemerintah vertikal (tingkat satuan kerja) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena satuan kerja merupakan ujung tombak pemerintah pusat di daerah dan berkaitan langsung dengan setiap penerapan peraturan-peraturan baru dalam hal ini yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual, dan sepengetahuan peneliti di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan masih sangat kurang.

Di sisi lain hasil penelitian sebelumnya mengenai akuntansi akrual di negara-negara lain belum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para pengadopsi akuntansi akrual dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen *et al*, 2007; Christiaens, 2001; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003 dalam Kusuma, 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual?
2. Apakah pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual?
3. Apakah pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan berpengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual yang dimoderasi oleh ukuran satuan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan secara simultan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan secara parsial terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual yang dimoderasi oleh ukuran satuan kerja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Sebagai sumber informasi mengenai pengaruh pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual dengan adanya moderasi satuan kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dalam penyusunan kebijakan penerapan akuntansi akrual untuk pemerintah daerah Kota Temanggung berdasarkan indikator-indikator pendukung penerapan akuntansi akrual yaitu pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bentuk penerapan studi yang diterima dibangku kuliah terutama mengenai pengaruh pelatihan staf, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual